# ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KABUPATEN SIAK


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : HELGA SYANETTA**

**NIM : 126232132**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**



**2024**


**LAPORAN TUGAS AKHIR**

# ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KABUPATEN SIAK

**DIAJUKAN OLEH:**


**NAMA : HELGA SYANETTA**

**NIM : 126232132**


**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**

**UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN**

**PROFESI AKUNTAN**


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**


**2024**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KABUPATEN SIAK**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**

**Helga Syanetta**
**126232132**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**SRIWATI S.E., M.Ak., Ak., CA**

## ABSTRAK

Aplikasi SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah oleh Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/ mandatory bagi semua pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD pada BKD di Kabupaten Siak, mengetahui bagaimana efektivitas SIPD pada BKD di Kabupaten Siak serta untuk mengetahui keunggulan aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi Sofit yang sebelumnya digunakan BKD Kabupaten Siak. Objek penelitian adalah penerapan SIPD pada BKD di Kabupaten Siak. Subjek penelitian ini adalah BKD Kabupaten Siak dan yang menjadi responden dan narasumber penelitian adalah pengambil keputusan dan pembuat kebijakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode campuran dengan model sekuensial eksplanatori. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD bisa diimplementasikan, SIPD efektif, dan SIPD unggul dibandingkan aplikasi Sofit pada BKD di Kabupaten Siak. Namun masih terdapat kendala-kendala yang harus dimitigasi oleh Pemerintah Kabupaten Siak.



Kata kunci : Implementasi, Efektivitas, Keunggulan SIPD, Sofit



## ABSTRACT

*The SIPD RI application has been designated as a general application in the field of regional governance by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) through the Minister of PANRB Decree Number 823 of 2023 concerning General Applications in the Field of Regional Governance. Based on these provisions, implementing the SIPD RI application is mandatory for all regional governments. This research aims to understand how the implementation of SIPD in the BKD of Siak Regency and to determine the effectiveness of SIPD in the BKD of Siak Regency, as well as to identify the advantages of the SIPD application compared to the Sofit application previously used by the BKD of Siak Regency. The object of the research is the implementation of SIPD at the district BKD. The subject of this research is the BKD of Siak District, and the respondents and informants of the research are decision-makers and policymakers. The types of data used in this research are quantitative and qualitative. The data source used is primary data. The data in this study were analyzed using a mixed-methods approach with an explanatory sequential model. Based on the research results, shows that SIPD can be implemented, SIPD is effective, and SIPD is superior compared to the Sofit application in BKD Siak Regency. However, there are still obstacles that need to be mitigated by the Siak Regency Government.*



*Keywords: Implementation, Effectiveness, Advantages of SIPD, Sofit*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk suamiku tercinta Dr. Wijang Widhiarso, M.Kom. dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Sriwati S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2024

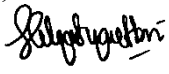

Helga Syanetta

# DAFTAR ISI

COVER .....
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
ABSTRAK ..... iii
ABSTRACT ..... iii
KATA PENGANTAR ..... iv
DAFTAR ISI ..... v
DAFTAR TABEL ..... vi
DAFTAR GAMBAR ..... vii
DAFTAR LAMPIRAN ..... viii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
BAB II LANDASAN TEORI ..... 8
2.1 Konsep Implementasi ..... 8
2.2 Efektifitas ..... 9
2.3 Sistem Informasi ..... 10
2.4 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ..... 10
2.5 Aplikasi Sofit ..... 11
2.6 Kerangka Penelitian ..... 11
BAB III METODE PENELITIAN ..... 13
3.1 Desain Penelitian ..... 13
3.2 Sumber Data dan Tempat Penelitian ..... 14
3.3 Instrumen Penelitian ..... 15
3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian ..... 16
3.5 Pengolahan dan Analisis Data ..... 16
BAB IV HASIL DAN BAHASAN ..... 19
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 19
4.2 Deskriptif Penelitian ..... 19
4.3 Deskriptif Indikator Penelitian ..... 20
4.4 Pengujian Permasalahan ..... 23
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian Kuantitatif ..... 27
4.6 Hasil wawancara ..... 30
4.7 Analisis Data ..... 32
4.8 Penarikan Simpulan ..... 35
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..... 38
REFERENSI ..... 40

# DAFTAR TABEL


Tabel 3.1. Intepretasi Skor ..... 17
Tabel 4.1. Interval Rata-Rata Pernyataan Jumlah Responden ..... 20
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Indikator Implementasi SIPD ..... 21
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Indikator Efektivitas SIPD ..... 21
Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Indikator Keunggulan SIPD dibanding Aplikasi Sofit ..... 22
Tabel 4.5. Intepretasi Skor Indikator Implementasi SIPD ..... 24
Tabel 4.6. Intepretasi Skor Indikator Efektivitas SIPD ..... 25
Tabel 4.7. Intepretasi Skor Indikator Keunggulan SIPD dibandingkan Aplikasi Sofit ..... 26
Tabel 4.8. Hasil Wawancara Implementasi SIPD ..... 30
Tabel 4.9. Hasil Wawancara Efektivitas SIPD ..... 31
Tabel 4.10. Hasil Wawancara Efektivitas SIPD ..... 32
Tabel 4.11. Hasil Wawancara Indikator yang Belum Mendukung Implementasi SIPD ..... 33
Tabel 4.12. Hasil Wawancara Indikator yang Belum Mendukung Efektivitas SIPD ..... 34
Tabel 4.13. Hasil Wawancara Indikator yang Belum Mendukung Keunggulan SIPD dibandingkan Aplikasi Sofit ..... 35

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Lingkup Aplikasi SIPD..... 2

Gambar 1.2 Implementasi Modul Informasi Keuangan Daerah SIPD TA 2021 s.d 2023 dan Rencana TA 2024 ..... 3

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ..... 12

Gambar 3.1 Tahapan Metode Campuran dan Desain Penelitian ..... 14

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKD ..... 19

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Wawancara

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

# BAB I
# PENDAHULUAN

Penyediaan informasi pemerintahan daerah diwajibkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada klausul 391. Penyediaan informasi pemerintahan daerah dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kewajiban pelaksanaan SIPD diatur secara khusus lagi melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat mulai tahun 2021 dilaksanakan pemda telah menggunakan SIPD.

SIPD dapat digunakan sebagai gerbang data dan informasi dalam penunjang penyelenggaraan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan pembangunan daerah melalui sistem elektronik (Afifah dkk, 2023). SIPD bertujuan untuk mengatur urutan tata dokumen perencanaaan daerah menurut ketentuan hukum berlaku yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Alfani & Nasution, 2022). Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik memberikan kemudahan untuk melakukan evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum sesuai dengan tujuan SIPD yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Alfani & Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran dapat dicapai dengan menggunakan SIPD yang merupakan sistem berbasis *online*. SIPD yang telah digunakan oleh Disperindag Sumut dapat lebih baik serta cepat dalam menghasilkan informasi data.

Pilar utama terkait pengelolaan keuangan daerah yang diatur pada PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Wujud dalam penerapan transparansi adalah kewajiban pemda untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang diberitahukan untuk warga negara, meliputi informasi penganggaran, realisasi anggaran, dan laporan keuangan. Dalam penerapan akuntabilitas, pemda harus menyediakan laporan keuangan dengan basis bukan kas melainkan akrual yang mengandung dasar-dasar menepati waktu dan dilaksanakan berdasarkan SAP yang berterima umum (BPK, 2024).

Pengembangan SIPD dilaksanakan mengacu pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Permendagri tersebut menyebutkan bahwa SIPD disusun untuk memberikan pelayanan informasi pemda yang saling terkoneksi dan menyatu dalam jaringan. Aplikasi SIPD terdiri dari: informasi bangda, informasi keuda, dan informasi pemda lainnya. Lingkup SIPD dapat diilustrasikan dengan gambar 1.1.

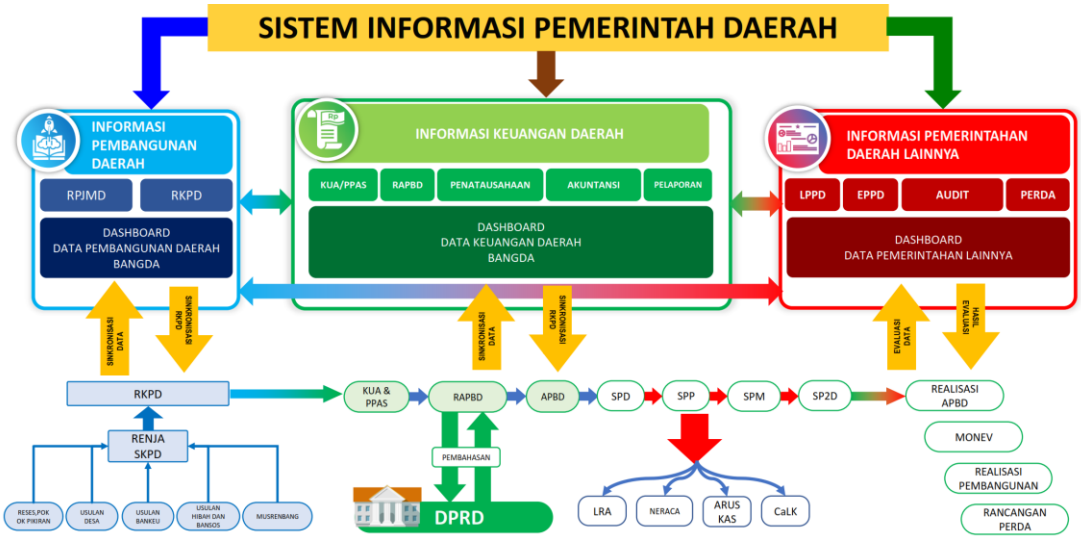


**Gambar 1.1 Lingkup Aplikasi SIPD**

*(Sumber: Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda, 2022)*

Informasi keuangan daerah setidaknya memuat: (1) data perencanaan anggaran daerah; (2) data pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; (3) data akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; (4) data pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; (5) data barang milik daerah; serta (6) data keuangan daerah lainnya. SIPD sebagai sistem informasi dalam pengelolaan keuangan harus dapat mengakomodir seluruh proses pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan dapat menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Sampai dengan 29 Mei 2023, Kemendagri telah mengembangkan dan mengimplementasikan SIPD Modul Informasi Keuangan Daerah yang terdiri dari: Submodul Penganggaran, Submodul Penatausahaan dan Submodul Aklap. Perkembangan implementasi Modul Informasi Keuangan Daerah dapat diilustrasikan dengan gambar 1.2 (BPK, 2024).

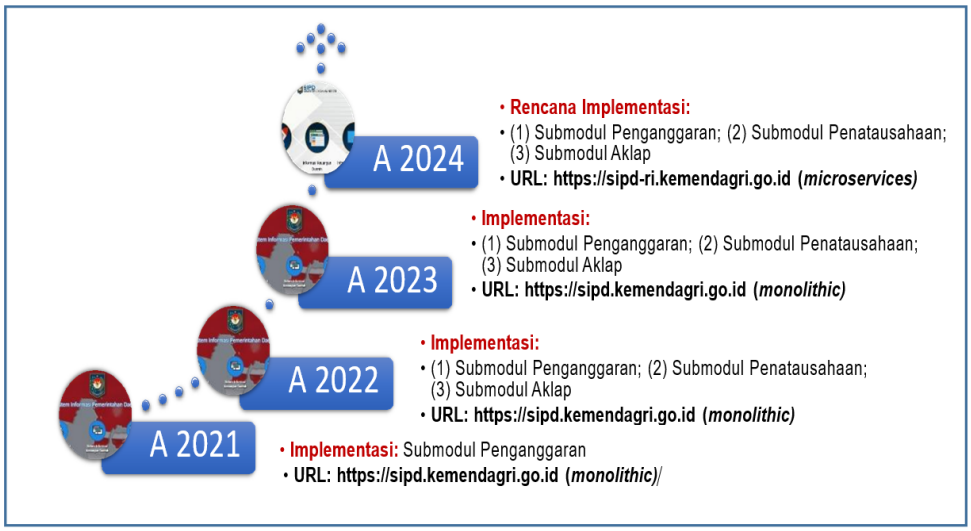


**Gambar 1.2 Implementasi Modul Informasi Keuangan Daerah SIPD TA 2021 s.d 2023 dan Rencana TA 2024**

*(Sumber: BPK, 2024)*

Sebelum TA 2024, Pemda belum diwajibkan menggunakan SIPD Modul Informasi Keuangan Daerah secara penuh melalui URL https://sipd.kemendagri.go.id/. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 905/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021 dan SE Nomor 903/9232/Keuda tanggal 16 Desember 2021 Pemda mempunyai kesulitan dalam penggunaan SIPD Submodul Penatausahaan, diantaranya diperbolehkan untuk menyelenggarakan penatausahaan menggunakan aplikasi lain. Namun, Pemda tersebut juga harus merekam penatausahaannya melalui SIPD berdasarkan peraturan, paling lambat setidaknya di penghujung bulan dan selalu melakukan komunikasi dengan Ditjen Bina Keuda. Pada TA 2024, Pemda telah diwajibkan menggunakan SIPD Modul Informasi Pembangunan Daerah dan Modul Informasi Keuangan Daerah dengan penuh melalui URL https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023. Mulai TA 2024, diharapkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan telah terintegrasi secara penuh (BPK, 2024).

Aplikasi SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah oleh Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/ *mandatory* bagi semua pemerintah daerah. Berdasarkan surat percepatan penggunaan modul penatausahaan

dan akuntansi pelaporan pada aplikasi SIPD RI di pemerintah daerah oleh KPK Nomor B/5629/GAH.00/10-11/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 kepada kepala daerah menyebutkan bahwa, terdapat 367 pemerintah daerah telah menggunakan seluruh modul SIPD RI dan masih tersisa 179 pemerintah daerah yang belum menggunakan modul pentausahaan dan akuntansi pada aplikasi SIPD RI. Berdasarkan surat tersebut, salah satu pemerintah daerah yang belum menggunakan seluruh modul SIPD RI (perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan) adalah Pemerintah Kabupaten Siak.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menggunakan SIPD dalam seluruh proses penganggaran daerah TA 2022 yaitu mulai dari penyusunan KUA dan PPAS hingga penetapan APBD. Dalam proses penatausahaan sampai dengan penyusunan DPA, Pemerintah Kabupaten Siak juga menggunakan SIPD. Sedangkan untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas, Pemerintah Kabupaten Siak menggunakan aplikasi Sofit yang dikembangkan sendiri dalam proses penatausahaan sebagai pendamping dalam penggunaan SIPD. Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak menggunakan *output* yang dihasilkan dari aplikasi Sofit untuk kemudian disusun secara manual *excel*. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam menggunakan aplikasi SIPD tersebut antara lain : (1) Hampir setiap tahun diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pembaharuan pengklasifikasian, pengkodefikasian, dan tata nama perencanaan, pembangunan dan keuangan daerah berdampak sering terjadinya hapus dan *input* ulang data dikarenakan adanya pembaruan-pembaruan pada SIPD; (2) Masih terdapat pembaruan-pembaruan pada aplikasi, sehingga menimbulkan pemutakhiran data yang menjadi tidak sempurna; (3) Aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-fitur karena kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah; (4) Menu evaluasi APBD belum dapat di gunakan sehingga Evaluasi APBD dilakukan manual oleh Pemerintah Provinsi; dan (5) Kurang responnya *Helpdesk* Kementerian Dalam Negeri dalam mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan teknis SIPD.

Hal yang sama terjadi pada penelitian yang dilakukan Wurara, dkk (2020) yang menyatakan belum terlaksananya implementasi SIPD dengan baik disebabkan kurang efisien dalam hal waktu, kurangnya kualitas SDM pada SKPD dan tidak dapat dioperaksikannya SIPD oleh operator merupakan dampak atas bimtek yang kurang

diselenggarakan dan tidak memenuhi kebutuhan operator. Sama halnya dengan temuan Vira dan Husna (2022) yang menyebutkan bahwa SIPD tidak berjalan optimal selama implementasi, merupakan dampak terjadinya kesukaran dalam penyediaan jaringan diantara pemerintah yang belum didukung dengan regulasi sebagai dasar pemerintah pusat untuk mengatur pengimplementasian dalam pengelolaan jaringan secara menyeluruh dan regional. Hasil penelitian vitriana, dkk (2022) menambah dukungan terhadap permasalahan tersebut yaitu menyebutkan pengimplementasian SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru tidak termasuk dalam kategori optimal dimana SIPD yang diplikasikan tidak termasuk dalam kategori efektif, tetapi SIPD memiliki keunggulan dalam luasan cakupan yang terintregasi ke organisasi perangkat daerah di Indonesia. Penelitian Widiya (2022) menunjukkan hasil sejenis yaitu menyebutkan bahwa implementasi SIPD pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir tidak termasuk dalam kategori optimal disebabkan memiliki indikator yang tidak termasuk dalam kategori terpenuhi baik. Penelitian Asa, dkk (2022) juga menunjukkan bahwa tata kelola SIPD belum berjalan dengan baik. Temuan Citra (2023) menunjukkan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal. Hasil yang sama juga masih ditunjukkan oleh penelitian Afifah, dkk (2023) yaitu implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo terkait SIPD yang direncanakan, SIPD yang disosialisasikan untuk organisasi perangkat daerah, data yang disikan pada aplikasi SIPD, dan monev atas SIPD terkait pengisian data menyebutkan kesulita antara lain : (1) SOP yang belum ada; (2) frekuensi terganggungya server SIPD; (3) Kondisi Kabupaten Wonosobo belum memenuhi indikator yang diukur pada SIPD; dan (4) Kurang memadainya sarana prasarana penunjang internet. Hasil penelitian Pramana, dkk (2023) juga masih menemukan hal yang sama yaitu implementasi SIPD diliputi oleh kesulitan, antara lain yaitu sistem lainnya masih perlu mendampingi SIPD karena dinilai belum efisien maupun efektif dan efisien, serta fitur-fitur yang belum muncul pada aplikasi SIPD menyebabkan kendala dalam penerapan keseluruhan. Temuan tersebut masih didukung oleh hasil penelitian Tumija, dkk (2023) yang menyebutkan bahwa di Kota Semarang terdapat kendala untuk tata kelola keuangan daerah menggunakan SIPD diantaranya: (1) pemerintah pusat belum optimal dalam memberikan cara pengoperasian SIPD; (2) Kurang kuatnya ketersediaan server; dan (3) Belum tersedianya pedomandan menu penatausahaan keuangan terkait akuntansi dan pelaporan realisasi anggaran.

Berbeda dengan temuan yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Karundeng, dkk (2021) yang menyebutkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi) dan struktur birokrasi, implementasi SIPD sudah sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dalam hal kebijakan serta perencanaan dan penganggaran daerah sudah berjalan sesuai integrasinya yang telah dilaksanakan oleh Bapelitbangda Sitaro sehingga SIPD pada tahun anggaran 2021 telah wajib digunakan. Hasil penelitian Nasution dan Nurwani (2021) menunjukkan temuan yang mendukung yaitu menyebutkan BPKAD telah menggunakan SIPD dan bertujuan menjadi wadah sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah serta sistem pemerintah daerah lain. Temuan Alfani dan Nasution (2022) menunjukkan hasil yang memperkuat penelitian sebelumnya yaitu ditemukan bahwa penerapan SIPD termasuk dalam kategori efektif dan lebih cepat dan mudahnya dirasakan oleh pegawai di Disperindag Sumut dalam menyelesaikan pekerjaan, meskipun input dengan jelas belum dipahami oleh *end user* sistem dalam kisaran 60-70%, dengan demikian pengawasan yang lebih baik dibutuhkan oleh pegawai. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian oleh Wurara, dkk (2022) memperlihatkan hasil yaitu aplikasi SIPD dinilai inovatif dan berkemampuan dalam meningkatkan efisiensi dikarenakan menggunakan basis elektronik dalam penyusunan perencanaan dan terintegrasi dengan pusat dan daerah sehinggal SIPD memiliki efektivitas di Kota Tomohon dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga dengan temuan penelitian Setiawan, dkk (2023) mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan komunikasi yang intens, sumberdaya yang cukup diantaranya kompetensi petugas, perangkat dan jaringan yang tersedia dan pelaksana dalam bersikap (Disposisi) yang proaktif serta pengelolaan sesuai SOP berdasarkan struktur birokrasi yang jelas telah dilaksanakan dalam pengelolaan SIPD. SIPD berada dalam kategori baik berdasarkan ISO/ IEC 25010.

Temuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Vitriana, dkk (2022) pada Pemerintah Kota Pekanbaru terkait analisis penerapan SIPD pada BPKAD Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada BKD Kabupaten Siak. Sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, BKD Kabupaten Siak bertanggung jawab atas pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (SIPD). Pemerintah Kabupaten Siak telah mengaplikasikan SIPD untuk perencanaan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun, untuk pelaksanaan dan pelaporan, masih mengaplikasikan Aplikasi Sistem Informasi

Keuangan (Sofit) dan belum mengaplikasikan SIPD dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan SIPD secara menyeluruh serta penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut terkait penggunaan SIPD pada BKD Kabupaten Siak untuk TA 2024.

Pokok penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana SIPD dilaksanakan di Kabupaten Siak berdasarkan teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi; (2) Seberapa efektif SIPD membantu perencanaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Siak; dan (3) Keungguan SIPD dibandingkan dengan aplikasi Sofit.

Studi ini akan mengeksplorasi perbedaan antara Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengaplikasikan SIPKD dan Pemerintah Kabupaten Siak yang mengaplikasikan Sofit untuk mengisi kesenjangan penelitian. Penelitian ini melibatkan pemangku kepentingan lainnya di BKD Siak, seperti Kepala BKD Siak, Sekretaris BKD Siak, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Pembiayaan, Kepala Bidang PAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Bidang PBB. Responden penelitian tidak terbatas pada Kepala Bidang Anggaran, Kepala bidang Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Diharapkan  yaitu hal ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana SIPD diterapkan dan berfungsi dengan baik di Kabupaten Siak.

## REFERENSI


Afifah, S.N., Subarno,A., & Akbarini, N.R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7 (2),171.

Afriansyah, M. F. (2016). Tingkat Kepuasan Members Fitness Terhadap Pelayanan Di Tempat Kebugaran Balai Kesehatan Olahraga Dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik (BKOR-PIPPM) Kabupaten Lumajang. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 6 (2),370-377.

Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1), 4036-4043.

Amroni, R.Z., & Alwany, T. (2024). Penerapan Pengawasan Terhadap Penerapan Aplikasi SIPD Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 5 (1), 1-14.

Asa, M.R.A., Setyowati,E., & Wike. (2022). Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah BP4D) Kabupaten Belu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(4), 346-352.

BPK. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementrian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik*. Jakarta: BPK-RI.

Citra, N. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. http://eprints.ipdn.ac.id/12523.

Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN 3032-2529 (Media Online), 1 (1).

Indra, R. (2023). Pengembangan Model Manajemen Mutu Sekolah Melalui Kepemimpinan dan Evaluasi Berbasis Sekolah. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15 (4), ISSN: 2087-9490 EISSN: 2597-940X.

Karundeng, A.B., Kaawoan, J.E., & Pangemanan, S.E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1 (2), ISSN 2088-2815.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2023 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Mukhyi, M.A. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Nasution, M.I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9 (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pramana, A.C., Yap.N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Ekuivalensi*, 9 (1).

Rifka, F.R. (2013). Pengaruh Kepuasan Kerja, Job Insecurity dan Komitmen Profesional Terhadap Keinginan Berpindah Auditor. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.

Rofiqoh, I., & Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, Z., Amali, L.N., & Polin, M. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/ IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. *Difusion*, 3 (1).

Surat Deputi Pencegahan dan Monitoring Selaku Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi Nomor B/529/GAH.00/10-11/08/2024 Perihal Percepatan Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI di Pemerintahan Daerah.

Tumija. Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *JMB Media Birokrasi*. https: //doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389

Vira, Y., & Husna, C.A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Proses Perencanaan di Kabupaten Aceh Barat. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1 (9), 536-541.

Vitriana, N., Agustiawan., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1 (1).

Wahyuningsih, D.T. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo*. Tugas Akhir. Universitas Tidar.

Widiya. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. Universitas Sriwijaya Indralaya.

Wurara, C.N.C., Sampe, S., Monintja, D.K., Mamentu, M., Pangemanan, F.N., & Rondonuwu, S.G. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Jurnal Publicuho*, 7 (2).

Wurara, C.N.C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2 (5). ISSN: 2337 – 5736.